



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 1083-1091

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Biaya Manfaat Sosial Pembelajaran Daring Saat COVID-19 Menurut Persepsi Mahasiswa UNIMED

Daffa Alfah Ridho Naipospos¹, Geby Natalia ButarButar², Mutia Sugianto³, Nazwa Aulia Putri⁴, Septriani Theresia Siagian⁵

¹²³⁴⁵Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

¹dafaridho783@gmail.com, ²gebynatalia.7243240033@mhs.unimed.ac.id, ³mutiasugianto151@gmail.com,

⁴dindamanis916@gmail.com, ⁵septriani.7243240015@mhs.unimed.ac.id

Abstrak

Studi ini mengevaluasi biaya dan manfaat sosial yang terkait dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19, khususnya dari perspektif mahasiswa Universitas Negeri Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan survei terhadap 78 mahasiswa dari berbagai program studi. Hasil penelitian menunjukkan beragam aspek biaya sosial, seperti beban keuangan akibat pengeluaran tambahan untuk biaya kuota internet sebesar Rp50.000 hingga Rp100.000 per bulan yang dirasakan oleh 52,6% responden, permasalahan teknis berupa gangguan koneksi jaringan yang dialami oleh 85,9% mahasiswa, serta dampak psikologis seperti kelelahan, stres, dan penurunan motivasi yang dilaporkan oleh 83,1% peserta. Dari sisi manfaat sosial, 92,3% mahasiswa merasa lebih aman dari risiko penyebaran virus, 89,7% mengalami penghematan biaya transportasi dan konsumsi harian, serta 89,7% merasakan peningkatan kemampuan digital dan adaptasi terhadap teknologi pembelajaran daring. Secara keseluruhan, mahasiswa memberikan penilaian positif terhadap kebijakan ini, dengan 59% menyatakan kebijakan ini "cukup sesuai", 34,6% menilai "sangat sesuai", dan 46,2% merasa bahwa keuntungan dan kesulitan relatif seimbang. Berdasarkan Analisis Biaya-Manfaat Sosial, studi ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat biaya sosial yang cukup tinggi, manfaat seperti perlindungan kesehatan, efisiensi biaya, serta peningkatan keterampilan digital dinilai setara bahkan lebih besar. Oleh karena itu, kebijakan ini dianggap efektif sebagai langkah darurat pendidikan saat pandemi, sekaligus memberikan pelajaran penting bagi perumusan kebijakan pendidikan di masa depan.

Kata kunci: Online Learning, Social Costs, Social Benefits, Cost-Benefit Analysis, COVID-19, Public Economics

1. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sistem pendidikan. Di Indonesia, kebijakan pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah membuat kegiatan belajar mengajar tatap muka tidak dapat dilaksanakan secara normal. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19, yang mendorong seluruh lembaga pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring atau online learning. Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pendidikan sekaligus melindungi kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik di tengah krisis kesehatan global.

Perubahan mendadak menuju sistem pembelajaran daring ini menimbulkan berbagai konsekuensi sosial dan ekonomi bagi mahasiswa sebagai penerima manfaat utama kebijakan pendidikan. Di satu sisi, sistem daring memberikan fleksibilitas waktu, efisiensi biaya transportasi, dan peningkatan keterampilan digital. Namun, di sisi lain, muncul pula berbagai bentuk biaya sosial seperti meningkatnya pengeluaran untuk kuota internet, gangguan koneksi jaringan, keterbatasan fasilitas perangkat, hingga tekanan psikologis akibat isolasi sosial dan kelelahan digital. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi juga menimbulkan efek eksternalitas terhadap kesejahteraan sosial mahasiswa.

Dalam konteks ekonomi publik, kebijakan pendidikan seperti pembelajaran daring dapat dianalisis melalui kerangka Analisis Biaya-Manfaat Sosial (Social Cost-Benefit Analysis atau SCBA). Menurut Boardman et al. (2018), SCBA merupakan pendekatan yang digunakan untuk menilai sejauh mana manfaat sosial dari suatu kebijakan publik dapat menutupi biaya sosial yang ditimbulkannya. Dalam kerangka ini, kebijakan dianggap

efisien apabila manfaat sosial yang diperoleh masyarakat lebih besar daripada biaya sosial yang ditanggung. Pendekatan ini relevan digunakan dalam menilai kebijakan pembelajaran daring karena kebijakan tersebut melibatkan pengorbanan sumber daya, perubahan perilaku sosial, serta dampak terhadap kesejahteraan publik secara luas.

Selain itu, teori eksternalitas yang dikemukakan oleh Stiglitz (2000) dan Musgrave & Musgrave (1989) juga dapat digunakan untuk memahami dampak pembelajaran daring. Eksternalitas positif muncul dalam bentuk peningkatan literasi digital, efisiensi biaya transportasi, dan perlindungan kesehatan masyarakat, sedangkan eksternalitas negatif muncul dari tekanan mental, kesenjangan akses teknologi, serta penurunan kualitas interaksi sosial. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan daring perlu dianalisis tidak hanya dari segi efektivitas pembelajaran, tetapi juga dari sisi keseimbangan antara manfaat dan biaya sosial yang timbul di masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pembelajaran daring, namun sebagian besar berfokus pada efektivitas metode belajar atau kesiapan teknologi. Misalnya, penelitian Dhawan (2020) dan Adedoyin & Soykan (2020) menemukan bahwa pembelajaran daring memberikan peluang bagi inovasi pendidikan, tetapi masih menghadapi tantangan berupa kesiapan infrastruktur dan kesenjangan digital. Di Indonesia, studi Dewi (2020) dan Handarini & Wulandari (2020) menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami kendala dalam beradaptasi dengan sistem daring karena keterbatasan akses internet dan kemampuan teknologi. Namun, kajian-kajian tersebut belum banyak menelaah dari perspektif biaya–manfaat sosial, khususnya bagaimana mahasiswa menilai keseimbangan antara beban dan keuntungan sosial dari kebijakan ini.

Dari sisi sosial-ekonomi, mahasiswa merupakan kelompok yang paling terdampak oleh kebijakan pendidikan daring karena mereka harus menanggung beban biaya tambahan yang sebelumnya tidak ada dalam sistem tatap muka. Biaya kuota internet, peningkatan penggunaan listrik, serta pembelian perangkat pembelajaran menjadi bentuk *private cost* yang secara kumulatif menimbulkan *social cost* bagi masyarakat pendidikan. Di sisi lain, mahasiswa juga memperoleh *social benefit* seperti keamanan dari risiko penularan penyakit, penghematan biaya hidup harian, serta peningkatan kompetensi digital yang berguna di masa depan. Melalui pendekatan SCBA, keseimbangan antara kedua sisi ini dapat dianalisis secara menyeluruh untuk menilai efektivitas kebijakan.

Dari perspektif pendidikan, pembelajaran daring membawa transformasi besar terhadap cara belajar, cara mengajar, dan interaksi akademik. Menurut Hrastinski (2008) dan Rapanta et al. (2020), sistem *e-learning* menuntut tingkat kemandirian belajar yang tinggi, kemampuan manajemen waktu, serta keterampilan komunikasi virtual. Bagi mahasiswa yang memiliki kesiapan digital, sistem ini menjadi peluang untuk memperkuat kompetensi abad ke-21, seperti berpikir kritis, kolaborasi daring, dan literasi teknologi. Namun, bagi mahasiswa dengan keterbatasan fasilitas, sistem ini justru dapat memperlebar kesenjangan sosial. Hal inilah yang membuat analisis kebijakan daring dari sisi sosial-ekonomi menjadi penting untuk dilakukan.

Universitas Negeri Medan (UNIMED) sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi negeri di Sumatera Utara menjadi contoh menarik dalam konteks penelitian ini. Sebagai kampus yang menaungi ribuan mahasiswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, pengalaman mahasiswa UNIMED dalam mengikuti pembelajaran daring memberikan gambaran nyata tentang keberhasilan dan tantangan kebijakan tersebut. Dengan melibatkan 78 responden dari berbagai program studi, penelitian ini berupaya menangkap persepsi mahasiswa terhadap biaya dan manfaat sosial pembelajaran daring, baik dari sisi finansial, psikologis, maupun akademik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis biaya–manfaat sosial pembelajaran daring menjadi penting untuk dilakukan guna mengevaluasi sejauh mana kebijakan pendidikan pemerintah mampu mencapai efisiensi sosial dalam kondisi darurat. Penelitian ini berupaya menjawab kesenjangan kajian sebelumnya dengan memfokuskan perhatian pada pengalaman empiris mahasiswa Universitas Negeri Medan. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya literatur mengenai kebijakan pendidikan di masa krisis, tetapi juga memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam merancang sistem pembelajaran yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan menggambarkan dan menganalisis bagaimana mahasiswa mempersepsikan biaya serta manfaat sosial dari kebijakan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Penelitian ini tidak bertujuan menguji suatu hipotesis atau membuat kesimpulan umum, melainkan fokus pada pemahaman, pengalaman, dan tanggapan

mahasiswa terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan tinggi. Sumber data utama dalam penelitian ini didapatkan melalui pengisian kuesioner secara daring menggunakan Google Form.

Kuesioner tersebut terdiri dari 15 soal pilihan ganda dan beberapa soal terbuka, yang dibuat berdasarkan tiga indikator utama, yaitu:

1. Biaya sosial, yang mencakup beban finansial dan psikologis akibat pembelajaran daring, seperti kuota internet, kendala jaringan, dan stres belajar.
2. Manfaat sosial, yang mencakup keuntungan sosial dan pendidikan yang diperoleh, seperti fleksibilitas waktu, keamanan kesehatan, serta peningkatan kemampuan digital.
3. Persepsi terhadap kebijakan, yaitu penilaian mahasiswa tentang efektivitas, pemerataan, dan keadilan kebijakan pemerintah dalam sistem pembelajaran daring.

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Medan yang pernah mengikuti pembelajaran daring selama masa pandemi, yaitu tahun 2020 sampai dengan 2022. Jumlah responden sebanyak 78 orang, yang dipilih dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria mereka pernah langsung terlibat dalam pembelajaran daring. Pengumpulan data dilakukan secara daring dengan membagikan tautan kuesioner kepada mahasiswa melalui media sosial dan jaringan perkuliahan.

Teknik analisis ini digunakan untuk memperlihatkan gambaran objektif mengenai dampak sosial dari kebijakan pembelajaran daring terhadap mahasiswa serta sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat yang seimbang dengan biaya yang dibebankan kepada masyarakat pendidikan tinggi. Semua data didapatkan dari hasil kuesioner daring melalui Google Form. Data mentah disimpan oleh peneliti sebagai dokumen untuk mendukung keabsahan hasil penelitian, meskipun tidak semua grafik disajikan dalam artikel karena keterbatasan ruang publikasi.

3. Hasil dan Diskusi

Penelitian ini melibatkan 78 mahasiswa Universitas Negeri Medan yang pernah mengikuti pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Dari hasil kuesioner, sebagian besar responden adalah perempuan yaitu 61,5%, sedangkan 38,5% laki-laki. Komposisi ini menunjukkan bahwa kelompok perempuan memiliki keterlibatan yang relatif tinggi dalam kegiatan akademik berbasis daring. Fenomena ini dapat dijelaskan karena mahasiswa perempuan cenderung memiliki tingkat kedisiplinan dan partisipasi akademik yang konsisten, terutama dalam kegiatan belajar berbasis platform digital. Hal ini sejalan dengan penelitian Aristovnik et al. (2020) yang menyebutkan bahwa mahasiswa perempuan menunjukkan tingkat adaptasi dan ketekunan lebih tinggi dalam sistem pembelajaran online dibandingkan laki-laki, karena lebih mampu mengatur waktu belajar dan konsentrasi secara mandiri.

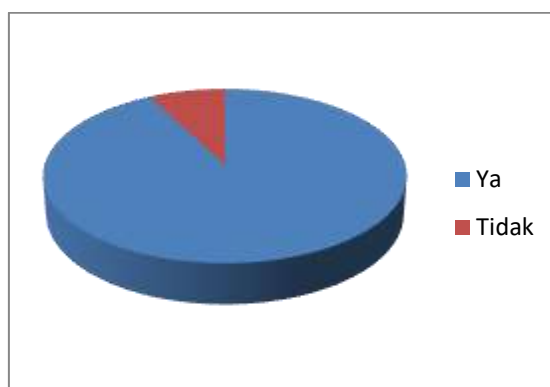
Dari segi usia, sebanyak 59% responden berusia di bawah 20 tahun, 24,4% berada pada rentang 20–22 tahun, dan 16,7% berusia di atas 22 tahun. Distribusi ini memperlihatkan bahwa mayoritas mahasiswa yang menjadi responden berada pada kelompok usia produktif dan termasuk generasi digital native yang sudah terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan adaptif ini berkontribusi pada efektivitas pembelajaran daring, karena mahasiswa relatif mudah menyesuaikan diri dengan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan Learning Management System (LMS) yang digunakan kampus. Namun, kelompok usia yang lebih tua dilaporkan menghadapi sedikit kesulitan dalam manajemen waktu dan interaksi virtual karena kebiasaan belajar yang sebelumnya lebih banyak dilakukan secara tatap muka.

Selain itu, 94,9% mahasiswa menyatakan pernah mengikuti pembelajaran daring selama pandemi, sedangkan 5,1% tidak pernah. Tingginya tingkat partisipasi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh responden memiliki pengalaman langsung terhadap implementasi kebijakan pendidikan daring yang diterapkan pemerintah. Fakta tersebut memperkuat validitas penelitian ini karena persepsi yang diukur benar-benar berasal dari individu yang merasakan dampak kebijakan secara nyata, baik dari sisi manfaat maupun beban sosialnya.

Manfaat Sosial dari Pembelajaran Daring

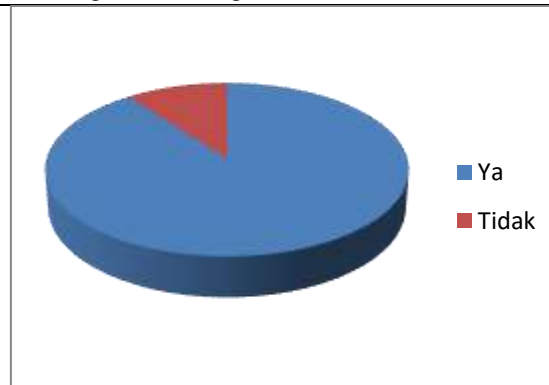
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 memberikan sejumlah manfaat sosial yang signifikan bagi mahasiswa Universitas Negeri Medan. Sebanyak 73,1% responden menyatakan bahwa sistem pembelajaran daring membantu mereka untuk tetap melanjutkan kegiatan

belajar meskipun seluruh aktivitas tatap muka dihentikan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menerapkan sistem pendidikan jarak jauh berhasil menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di tengah krisis kesehatan global. Dalam konteks ekonomi publik, kebijakan ini memberikan manfaat sosial berupa keberlanjutan layanan pendidikan yang merupakan barang publik esensial, sehingga tidak terjadi “education gap” antar wilayah akibat pembatasan fisik. Selain itu, pembelajaran daring juga menciptakan fleksibilitas dalam mengatur waktu belajar, di mana mahasiswa dapat menyesuaikan jadwal akademik dengan kondisi rumah tangga, kesehatan, dan koneksi internet yang dimiliki. Kebijakan ini juga menumbuhkan bentuk solidaritas sosial baru melalui kolaborasi virtual antara mahasiswa dan dosen, yang memperkuat interaksi akademik lintas lokasi tanpa batas ruang dan waktu. Lebih jauh, manfaat sosial yang muncul tidak hanya terbatas pada dimensi akademik, tetapi juga mencakup peningkatan kesadaran akan pentingnya literasi digital serta kemandirian belajar. Mahasiswa menjadi lebih terampil menggunakan berbagai platform digital seperti Google Classroom, Zoom, dan Learning Management System, yang tidak hanya berguna selama pandemi tetapi juga berpotensi menjadi keterampilan dasar yang mendukung kesiapan mereka menghadapi dunia kerja berbasis teknologi di masa depan. Dengan demikian, manfaat sosial pembelajaran daring mencakup aspek keberlanjutan pendidikan, efisiensi waktu, penguatan kapasitas teknologi, serta pembentukan karakter adaptif mahasiswa terhadap perubahan lingkungan belajar yang dinamis.



Gambar 1. Persentase Mahasiswa yang merasa lebih aman dari risiko penularan COVID-19

Dari sisi kesehatan, sebanyak 92,3% mahasiswa merasa lebih aman dari risiko penularan COVID-19 karena dapat mengikuti seluruh aktivitas perkuliahan dari rumah tanpa harus berinteraksi langsung di ruang kelas. Kondisi ini mencerminkan adanya eksternalitas positif dari kebijakan pembelajaran daring, yakni berkurangnya potensi penyebaran virus di lingkungan kampus yang padat interaksi. Hal ini sejalan dengan tujuan utama kebijakan pendidikan selama masa pandemi, yaitu memastikan keselamatan civitas akademika sekaligus menjaga keberlanjutan kegiatan belajar mengajar. Temuan ini memperlihatkan bahwa sistem daring tidak hanya berfungsi sebagai solusi teknis untuk menggantikan tatap muka, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang berkontribusi langsung terhadap kesehatan masyarakat. Selain manfaat kesehatan, 65,4% responden menilai pembelajaran daring memberikan fleksibilitas waktu belajar, yang memungkinkan mahasiswa mengatur ritme dan intensitas pembelajaran sesuai kondisi individu mereka. Fleksibilitas ini berdampak positif terhadap efisiensi waktu dan produktivitas akademik, terutama bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan mobilitas atau tanggung jawab lain di luar kuliah. Namun demikian, sebagian responden juga mengakui adanya tantangan baru berupa kesulitan menjaga konsentrasi dan manajemen waktu yang kurang efektif akibat batas antara ruang belajar dan ruang pribadi yang semakin kabur. Meskipun demikian, secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa manfaat sosial dari segi kesehatan dan efisiensi waktu masih jauh lebih dominan dibandingkan hambatan yang muncul, sehingga kebijakan pembelajaran daring dapat dikatakan berhasil memberikan perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan antara keselamatan dan keberlanjutan pendidikan di masa krisis.



Gambar 2. Persentase Mahasiswa mengaku lebih hemat biaya transportasi dan kebutuhan kuliah

Dalam aspek ekonomi, sebanyak 89,7% mahasiswa mengaku mengalami penghematan signifikan terhadap biaya transportasi dan kebutuhan kuliah karena tidak perlu melakukan perjalanan ke kampus setiap hari. Penghematan ini mencakup berbagai bentuk biaya langsung seperti ongkos transportasi, makan siang di luar rumah, biaya fotokopi, serta kebutuhan penunjang lainnya yang biasanya dikeluarkan selama kegiatan tatap muka. Fenomena ini menunjukkan adanya *social saving* atau pengurangan biaya sosial yang cukup besar sebagai dampak positif dari penerapan kebijakan pembelajaran daring. Dengan menurunnya pengeluaran rutin tersebut, mahasiswa dapat mengalokasikan kembali sumber daya finansial mereka untuk kebutuhan yang lebih produktif, seperti pembelian kuota internet, perangkat belajar, atau peningkatan kualitas materi akademik. Lebih jauh lagi, 89,7% responden juga menyatakan bahwa sistem pembelajaran daring memberikan efek tambahan berupa peningkatan kemampuan digital mereka, baik dalam penggunaan perangkat keras seperti laptop dan ponsel pintar, maupun aplikasi pendukung pembelajaran seperti Google Meet, Zoom, dan Microsoft Teams. Hal ini tidak hanya memperluas kompetensi teknologi mahasiswa, tetapi juga membentuk literasi digital yang menjadi keterampilan penting dalam ekonomi modern yang berbasis informasi. Manfaat jangka panjang dari peningkatan literasi teknologi ini akan berpengaruh pada kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja, di mana digitalisasi telah menjadi standar utama di berbagai sektor.

Secara keseluruhan, kebijakan pembelajaran daring terbukti memberikan dampak sosial positif, baik dari segi efisiensi ekonomi, peningkatan keterampilan, maupun keamanan kesehatan. Dalam konteks Analisis Biaya–Manfaat Sosial (SCBA), hasil ini menunjukkan bahwa manfaat sosial dari kebijakan pendidikan daring masih lebih besar dibandingkan biaya sosial yang muncul, sehingga kebijakan ini dinilai cukup efektif pada masa pandemi.

Persepsi Mahasiswa terhadap Kebijakan Pembelajaran Daring

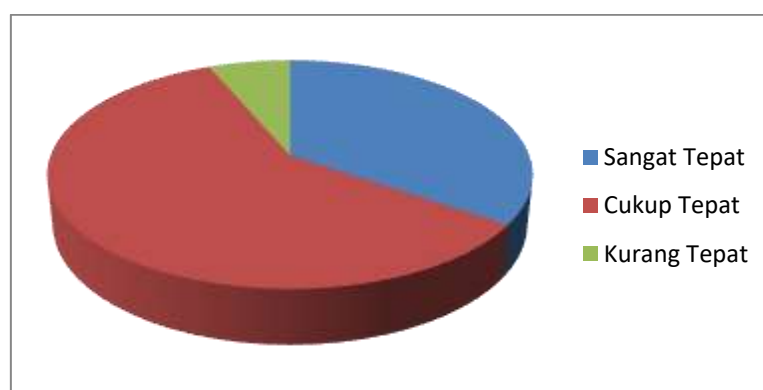


Gambar 3. Persentase Pandangan Mahasiswa terhadap Kebijakan Pemerintah dari Segi Manfaat

Persepsi mahasiswa Universitas Negeri Medan terhadap kebijakan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 menunjukkan pandangan yang cukup beragam, meskipun secara umum bernada positif. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden (46,2%) menilai bahwa keuntungan dan kesulitan dalam pembelajaran daring berada pada kondisi yang relatif seimbang, sedangkan 29,5% menganggap manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan hambatannya. Sementara itu, 24,4% responden merasa bahwa tantangan yang mereka hadapi justru lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Distribusi persepsi ini menunjukkan bahwa mahasiswa menilai kebijakan pembelajaran daring secara objektif dengan mempertimbangkan pengalaman pribadi dan

konteks sosial-ekonomi masing-masing. Kelompok mahasiswa yang menilai kebijakan ini bermanfaat cenderung menyoroti kemudahan akses terhadap materi kuliah, fleksibilitas waktu, serta peluang untuk belajar secara mandiri tanpa tekanan jadwal ketat. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa transisi mendadak dari sistem tatap muka ke daring menimbulkan tekanan adaptasi, terutama dalam hal penguasaan teknologi, beban tugas, dan kualitas komunikasi dengan dosen. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan pembelajaran daring sangat dipengaruhi oleh kesiapan individu dan infrastruktur digital yang tersedia.

Lebih lanjut, temuan ini menggambarkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki persepsi yang realistis dan rasional terhadap kebijakan pembelajaran daring. Mereka mampu menilai kebijakan tidak hanya dari sisi manfaat yang mereka peroleh, tetapi juga dari sisi hambatan yang dihadapi selama pelaksanaannya. Mahasiswa menyadari bahwa di balik fleksibilitas waktu dan keamanan kesehatan yang menjadi keunggulan utama sistem daring, terdapat pula masalah yang mengurangi efektivitas belajar, seperti keterbatasan jaringan internet, berkurangnya interaksi sosial akademik, serta meningkatnya rasa jenuh dan kelelahan mental akibat durasi layar yang panjang. Namun demikian, keseimbangan pandangan yang ditunjukkan responden menegaskan bahwa kebijakan pembelajaran daring tetap diterima secara sosial karena dinilai mampu menjawab kebutuhan pendidikan dalam situasi darurat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap kebijakan ini merefleksikan tingkat penerimaan yang cukup tinggi terhadap transformasi digital di sektor pendidikan, sekaligus menjadi indikator penting bagi pemerintah dan institusi pendidikan untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran daring secara berkelanjutan.



Gambar 4. Persentase Mahasiswa terhadap Ketepatan Kebijakan Pemerintah

Terkait dengan pandangan mahasiswa terhadap ketepatan kebijakan pemerintah dalam menerapkan sistem pembelajaran daring, mayoritas responden memberikan penilaian yang positif. Sebanyak 59% mahasiswa menilai bahwa kebijakan ini “cukup tepat”, dan 34,6% lainnya menganggap “sangat tepat”, sedangkan sebagian kecil responden menilai bahwa kebijakan tersebut masih kurang sesuai dengan kondisi mahasiswa di lapangan. Temuan ini menggambarkan bahwa kebijakan pembelajaran daring secara umum dipandang sebagai keputusan yang relevan dan solutif dalam menghadapi krisis pandemi, terutama karena berhasil memastikan keberlangsungan pendidikan tanpa menambah risiko kesehatan masyarakat. Dari perspektif ekonomi publik, kebijakan ini dapat dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah yang efektif dalam menjaga ketersediaan layanan pendidikan sebagai barang publik. Namun demikian, sebagian kecil responden yang merasa kebijakan ini belum tepat menyoroti adanya kesenjangan akses teknologi, terutama bagi mahasiswa dari daerah dengan koneksi internet terbatas dan kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan untuk memiliki perangkat pembelajaran yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan bersifat inklusif secara prinsip, penerapannya masih menghadapi kendala dalam aspek pemerataan infrastruktur dan keadilan akses pendidikan.

Adapun 6,4% responden yang menilai kebijakan pembelajaran daring “kurang tepat” mengemukakan alasan yang umumnya berkaitan dengan kendala teknis, ketimpangan fasilitas, dan penurunan efektivitas proses belajar. Kelompok ini menilai bahwa meskipun kebijakan tersebut penting untuk menjaga keselamatan di masa pandemi, pelaksanaannya belum sepenuhnya memperhatikan kesiapan mahasiswa dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi. Sebagian mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyediakan perangkat yang memadai seperti laptop atau ponsel dengan spesifikasi tinggi, sementara jaringan internet di beberapa daerah masih tidak stabil sehingga menghambat partisipasi dalam kelas daring. Selain itu, faktor psikologis seperti kejenuhan akibat durasi layar yang panjang dan minimnya interaksi sosial dengan dosen maupun teman sekelas turut memperburuk pengalaman belajar mereka. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pembelajaran daring tidak hanya bergantung

pada kebijakan pemerintah semata, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur digital, dukungan institusional, serta kemampuan adaptasi individu. Oleh karena itu, hasil ini menjadi catatan penting bagi pengambil kebijakan untuk memastikan pemerataan akses dan peningkatan kualitas dukungan teknis dalam setiap implementasi sistem pembelajaran daring di masa depan.

Secara keseluruhan, persepsi mahasiswa tersebut mencerminkan bahwa kebijakan pembelajaran daring memiliki legitimasi sosial yang kuat di kalangan penerima manfaatnya, yaitu mahasiswa sebagai pihak utama yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Dalam kerangka Analisis Biaya–Manfaat Sosial (Social Cost–Benefit Analysis / SCBA), pandangan positif ini mengindikasikan bahwa manfaat sosial yang dihasilkan seperti keberlangsungan proses pendidikan, perlindungan kesehatan, efisiensi biaya, serta peningkatan keterampilan digital masih dianggap sepadan bahkan lebih besar dibandingkan dengan biaya sosial yang ditanggung mahasiswa. Dengan kata lain, kebijakan ini tidak hanya dinilai tepat secara fungsional, tetapi juga memiliki nilai sosial yang signifikan dalam menjaga stabilitas sektor pendidikan di tengah keadaan darurat nasional. Pandangan ini memberikan dasar bagi pemerintah dan institusi pendidikan untuk mempertimbangkan integrasi sistem pembelajaran daring sebagai bagian permanen dari model pendidikan hibrida di masa depan, dengan memperhatikan peningkatan kualitas infrastruktur, dukungan psikososial, serta pemerataan akses agar kebijakan serupa dapat lebih efektif dan inklusif jika diterapkan kembali dalam situasi krisis berikutnya.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis biaya–manfaat sosial terhadap kebijakan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19, ditemukan bahwa kebijakan ini secara umum memberikan manfaat sosial yang cukup besar, meskipun tetap disertai sejumlah tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Temuan ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai persepsi mahasiswa terhadap efektivitas kebijakan pembelajaran daring, tetapi juga mengungkap aspek-aspek yang perlu diperbaiki agar kebijakan serupa dapat diterapkan secara lebih optimal di masa depan. Implikasi kebijakan berikut ini ditujukan kepada tiga kelompok utama yaitu pemerintah, universitas, dan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan serta peningkatan kualitas pembelajaran daring di Indonesia.

1) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini memberikan masukan penting bagi pemerintah bahwa kebijakan pembelajaran daring perlu disertai dukungan kebijakan lanjutan yang memastikan pemerataan akses pendidikan. Meskipun kebijakan ini berhasil menjaga keberlangsungan pendidikan di masa pandemi, sebagian mahasiswa masih menghadapi kendala seperti keterbatasan jaringan internet, beban kuota yang tinggi, dan perbedaan kondisi ekonomi antar daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur digital di daerah-daerah dengan akses internet lemah, menyediakan subsidi kuota internet bagi pelajar dari keluarga berpenghasilan rendah, serta mengembangkan platform pembelajaran nasional yang stabil dan mudah diakses. Kebijakan ini juga sebaiknya diintegrasikan ke dalam perencanaan jangka panjang sistem pendidikan Indonesia agar pembelajaran daring dapat menjadi alternatif yang efektif, bukan hanya solusi darurat ketika krisis terjadi.

2) Bagi Universitas

Bagi pihak universitas, temuan ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih adaptif dalam mengelola sistem pembelajaran daring. Universitas dapat memperkuat kapasitas dosen dan mahasiswa melalui pelatihan literasi digital, manajemen waktu, serta pemanfaatan teknologi pendidikan berbasis interaktif agar proses belajar tidak hanya bersifat satu arah. Selain itu, universitas juga perlu meningkatkan kualitas layanan akademik daring, seperti pengembangan Learning Management System (LMS) yang ramah pengguna, pemberian bantuan kuota bagi mahasiswa yang membutuhkan, serta pendampingan psikologis untuk mengurangi stres akibat tekanan akademik selama pembelajaran jarak jauh. Dengan langkah-langkah tersebut, universitas tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak utama transformasi pendidikan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

3) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, khususnya mahasiswa dan orang tua, kebijakan pembelajaran daring membawa implikasi sosial berupa perlunya peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi perubahan sistem pendidikan yang semakin berbasis teknologi. Mahasiswa perlu mengembangkan kemandirian belajar dan tanggung jawab pribadi yang lebih tinggi, sementara keluarga diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah. Masyarakat secara luas juga perlu melihat pembelajaran daring bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk memperluas wawasan digital dan meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dengan kolaborasi antara masyarakat, universitas, dan pemerintah, pembelajaran daring dapat menjadi katalis bagi pembangunan sumber daya manusia yang lebih tangguh, melek teknologi, dan siap menghadapi tantangan global pascapandemi.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pembelajaran daring saat pandemi COVID-19 dengan menggunakan kerangka Analisis Biaya–Manfaat Sosial (ABMS), berdasarkan pandangan 78 mahasiswa di Universitas Negeri Medan. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembelajaran daring dinilai memiliki tingkat legitimasi sosial dan efektivitas yang tinggi, terlihat dari sebagian besar responden (93,6%) yang menganggap kebijakan ini "cukup tepat" hingga "sangat tepat" sebagai jawaban terhadap krisis pandemi. Dari hasil analisis ABMS, terlihat adanya keseimbangan yang rumit antara biaya dan manfaat. Di satu sisi, kebijakan ini menimbulkan berbagai biaya sosial yang nyata. Biaya tersebut mencakup beban keuangan tambahan yang tinggi, seperti 96,2% responden yang mengeluarkan uang ekstra untuk biaya internet. Selain itu, ada juga biaya non-ekonomi, seperti tekanan psikologis (83,1% merasa lelah dan stres) dan masalah teknis (85,9% mengalami gangguan jaringan). Temuan ini juga menunjukkan adanya ketimpangan akses digital, yang menunjukkan isu ekuitas, di mana mayoritas mahasiswa masih merasa akses terhadap perangkat dan jaringan internet belum merata. Namun, biaya sosial tersebut dibalas oleh manfaat sosial yang lebih besar. Manfaat terbesar yang dirasakan adalah aspek kesehatan, yang menunjukkan bahwa 92,3% mahasiswa merasa lebih aman dari risiko tertular virus, sekaligus memastikan kelangsungan pendidikan (73,1%). Secara finansial, kebijakan ini menghasilkan penghematan sosial yang signifikan, karena 89,7% responden mengaku lebih irit dalam pengeluaran untuk transportasi dan akomodasi. Selain itu, 89,7% juga melihat adanya manfaat jangka panjang berupa peningkatan kemampuan digital. Dari segi keseluruhan, persepsi mahasiswa menunjukkan bahwa manfaat sosial yang diperoleh dianggap cukup sepadan, bahkan lebih besar dibandingkan dengan biaya sosial yang ditanggung. Meskipun diperlukan upaya untuk mengurangi beban biaya, terutama terkait pengadaan fasilitas dan dukungan psikologis, kebijakan ini secara efektif mampu memenuhi tujuan utamanya, yaitu menjaga kesehatan masyarakat sekaligus memastikan proses pendidikan tetap berjalan.

Referensi

- Adedoyin, O. B., & Soykan, E. (2020). *Covid-19 pandemic and online learning: The challenges and opportunities*. *Interactive Learning Environments*, 1–13.
- Aisyah, S. (2021). *Pembelajaran daring dan dampaknya terhadap hasil belajar mahasiswa di masa pandemi*. *Jurnal Pendidikan*, 12(1), 45–52.
- Allen, I. E., & Seaman, J. (2016). *Online report card: Tracking online education in the United States*. Babson Survey Research Group.
- Aristovnik, A., Keržič, D., Ravšelj, D., Tomaževič, N., & Umek, L. (2020). *Impacts of the COVID-19 pandemic on life of higher education students: A global perspective*. *Sustainability*, 12(20), 8438.
- Boardman, A. E., Greenberg, D. H., Vining, A. R., & Weimer, D. L. (2018). *Cost-benefit analysis: Concepts and practice* (5th ed.). Cambridge University Press.
- Dewi, W. A. F. (2020). *Dampak COVID-19 terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah*. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(3), 1–7.
- Dhawan, S. (2020). *Online learning: A panacea in the time of COVID-19 crisis*. *Journal of Educational Technology Systems*, 49(1), 5–22.
- Gramlich, E. M. (1997). *A guide to benefit-cost analysis* (2nd ed.). Waveland Press.
- Handarini, O. I., & Wulandari, S. S. (2020). *Pembelajaran daring sebagai upaya study from home (SFH) pada masa pandemi COVID-19*. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 8(3), 496–503.
- Herliandry, L. D., Nurhasanah, N., Suban, M. E., & Kuswanto, H. (2020). *Pembelajaran pada masa pandemi COVID-19*. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 22(1), 65–70.
- Hrastinski, S. (2008). *Asynchronous & synchronous e-learning*. *Educause Quarterly*, 31(4), 51–55.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud). (2020). *Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19)*. Jakarta: Kemendikbud.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill.

Pakpahan, R., & Fitriani, Y. (2020). *Analisa pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19*. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Pendidikan*, 6(1), 1–10.

Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Hyun, C. C., Wijayanti, L. M., & Putri, R. S. (2020). *Studi eksploratif dampak pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran online di sekolah dasar*. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 1–12.

Pujilestari, Y. (2020). *Dampak positif pembelajaran online dalam sistem pendidikan Indonesia pasca pandemi covid-19*. *Adalah*, 4(1), 49-56.

Rapanta, C., Botturi, L., Goodyear, P., Guàrdia, L., & Koole, M. (2020). *Online university teaching during and after the Covid-19 crisis: Refocusing teacher presence and learning activity*. *Postdigital Science and Education*, 2(3), 923–945.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Pearson Education.

Rosen, H. S., & Gayer, T. (2014). *Public finance* (10th ed.). McGraw-Hill Irwin.

Sadikin, A., & Hamidah, A. (2020). *Pembelajaran daring di tengah wabah Covid-19*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi*, 6(2), 214–224.

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2010). *Consumer behavior* (10th ed.). Pearson Prentice Hall.

Simanihuruk, T., Situmorang, M., Silitonga, H., & Sipayung, R. (2021). *Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran daring di era pandemi*. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 9(1), 55–64.

Singh, V., & Thurman, A. (2019). *How many ways can we define online learning? A systematic literature review of definitions of online learning (1988–2018)*. *American Journal of Distance Education*, 33(4), 289–306.

Son, C., Hegde, S., Smith, A., Wang, X., & Sasangohar, F. (2020). *Effects of COVID-19 on college students' mental health in the United States: Interview survey study*. *Journal of Medical Internet Research*, 22(9), e21279.

Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the public sector* (3rd ed.). W. W. Norton & Company.

Zhao, Y., & Watterston, J. (2021). *The changes we need: Education post COVID-19*. *Journal of Educational Change*, 22(1), 3–12.